BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak. Pajak termasuk memiliki peran penting dalam pemasukan negara selain pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendapatan non-pajak lainnya. Dikutip dari *website* www.kemenkeu.go.id pada April 2015, berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Hal serupa juga terjadi dengan wajib pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT.

Selain itu, dengan melihat kondisi *Tax Ratio* Indonesia yang tergolong rendah, seperti yang dikutip dari *website* www.infobanknews.com pada Agustus 2015, menurut Direktorat Jenderal Pajak, sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9% dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5% dan Malaysia 16,1%. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan Negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Penerimaan terbesar negara ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dalam upaya pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Meluasnya perkembangan ekonomi suatu negara menyebabkan terbukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Di jaman *modern* seperti sekarang banyak perusahaan yang bersifat *profit oriented*, sehingga perusahaan tersebut akan berusaha untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Hal ini pun mengakibatkan kondisi pasar yang sangat kompetitif. Laba diukur bukan hanya dari seberapa banyak penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, namun untuk membuka peluang laba semakin besar dapat dilakukan dengan cara lain, salah satunya adalah melalui efisiensi biaya. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai program pemerintah tanpa melihat kondisi perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan target dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, dan terakhir pada tahun 2015 pemerintah menargetkan sebesar Rp 1.294,25 triliun dan telah terealisasi senilai Rp 1.055 triliun untuk penerimaan pajak (www.bisnis.liputan6.com, pada bulan Januari, 2016). Perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu masalah yang sering ditemui yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

Terkait dengan melakukan efisiensi biaya, munculnya keragaman jenis transaksi keuangan dapat dijadikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan skema-skema transaksi yang berhubungan dengan efisiensi biaya. Salah satu

efisiensi biaya yang biasa dipilih oleh perusahaan adalah biaya yang berhubungan dengan pajak. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan cara *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Dikutip dari *website* www.investigasi.tempo.co pada Januari 2014, Direktorat Jenderal Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan *transfer pricing*. Dalam kasus tersebut dikatakan, modus yang dilakukan dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Penghindaran pajak memiliki tujuan untuk memilah beban-beban tertentu yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan dapat mengurangi pengeluaran kasnya meskipun penjualan dan pendapatan meningkat.

Faktor lain yang perlu kita lihat adalah pengenaan tarif pajak badan di Indonesia. Berdasarkan info yang dikutip dari halaman www.pajak.go.id pada Juni 2015, walaupun tarif pajak badan sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Hanya Malaysia yang sama 25%. Thailand 20%, Vietnam 22%, sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. Mengintip keluar lagi, Hongkong 16,5%. Apalagi negara *Tax Haven Countries*, seperti: Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok *corporate Tax* 0%. Hal ini memicu terjadinya Penghindaran Pajak di Indonesia semakin besar. Karena perusahaan cenderung melihat adanya peluang untuk mendapat pengenaan tarif lebih kecil dengan membangun usaha di negara tetangga.

Berbeda dengan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Sehingga penghindaran pajak tidak bisa disamakan dengan penggelapan pajak.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan, mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar. Untuk itu, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia diharuskan agar menerapkan *Corporate Governance*. *Corporate governance* menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dikutip dari *website* www.selasar.com pada November 2014, *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)* dalam publikasinya “*ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and Assessments 2012-2013*” pada tahun 2014, mengeluarkan hasil studinya terhadap penerapan *corporate governance* di enam negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Studi dilakukan terhadap perusahaan yang listed di pasar modal. Dan hasilnya, Indonesia berada pada urutan ke-5 dengan rata-rata poin 94 perusahaan yang disurvei 54.55 (maksimal 100). Peringkat paling tinggi adalah Thailand (75.39), kemudian Malaysia (71.69), Singapura (71.68), dan Filipina (57.99). Dari hasil studi tersebut, maka bisa dikatakan penerapan *corporate governance* di perusahaan Indonesia belum optimal.

Mekanisme pengendalian perusahaan Indonesia masih termasuk yang paling lemah. Pasar masih didominasi oleh sejumlah kecil konglomerat yang memiliki potensi dengan rezim kekuasaan, baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat, pengembangan strategi dan posisi kompetitif tidak didasarkan pada efisiensi dan kinerja financial, tetapi berdasarkan pada jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan.

Corporate Governance yang diterapkan suatu perusahaan nantinya akan menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan terkait pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan pada umumnya menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan berpengaruh pula pada pengenaan beban pajak yang besar. Ketika hal itu terjadi, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

Adapun faktor tambahan yang dapat memicu penghindaran pajak antara lain Nilai Perusahaan. Jenis Nilai Perusahaan dapat terlihat dari *ROA*, *Leverage*, *Sales Growth* dan Ukuran Perusahaan. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan (profitabilitas) perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan.

Leverage menggambarkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan guna membiayai aktivitas operasinya. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan

Sukartha, 2014). Menurut Durnev dan Kim (2005), Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara positif, karena perusahaan-perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan kemungkinan berada dalam observasi publik lebih besar. Pemerintah juga lebih berkonsentrasi pada perusahaan besar, karena semakin besar perusahaan semakin ahli sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk melihat pengaruh *corporate governance* dan nilai perusahaan dalam suatu perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian kali ini, penulis mengubah populasi dan *sample*. Penulis akan meneliti pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah *go public* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini penulis mengambil *literature* dari jurnal Kurniasih dan Sari (2013) dan Singly dan Sukartha (2015) sebagai acuan utama. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu:

1. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan mengenai pajak.
2. Keragaman jenis transaksi keuangan dapat menimbulkan upaya *Tax Avoidance*.
3. Tarif Pajak yang lebih rendah di negara tetangga lebih diminati oleh perusahaan dalam negeri.
4. Mekanisme pengendalian perusahaan di Indonesia masih lemah.

5. Beberapa komponen Nilai Perusahaan dapat memicu *Tax Avoidance*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dibuat guna menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara fokus. Pada penelitian ini penulis berfokus pada penghindaran pajak merupakan suatu yang legal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul skema-skema transaksi yang tidak dikehendaki dan memicu terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak Badan khususnya BUMN atas kewajibannya. Dengan melihat mekanisme *Corporate Governance* yang diukur dengan komposisi komisaris independen yang masih lemah dan masih dipengaruhi oleh koneksi politik serta komponen nilai perusahaan yang bervariasi seperti *ROA*, *leverage* dan ukuran perusahaan maka akan membuktikan bahwa apakah benar indikator-indikator tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak. Penelitian ini juga memiliki pembatasan pada pemilihan perusahaan BUMN, yaitu selain sektor perbankan, karena sistem keuangan pada perbankan berbeda dengan perusahaan lain.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara Komposisi Komisaris Independen dengan *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana hubungan antara ROA dengan *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana hubungan antara *Leverage* dengan *Tax Avoidance*?

4. Bagaimana hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*?

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, seperti:

1. Bagi Literatur

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah bukti penelitian dan pengetahuan baru agar semakin relevan.

2. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan mengenai praktik penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan juga dapat mengetahui mana saja yang berpengaruh dalam penerapan penghindaran pajak.